

**Implementasi Kerjasama US-India COMCASA (*Communication
Compatibility and Security Agreement*) terhadap Stabilitas Keamanan
Kawasan Asia Selatan**



PROPOSAL

*Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar
sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

HARUN ALRASYID AR

E061171322

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL IMPLEMENTASI KERJASAMA US-INDIA COMCASA
(COMMUNICATION COMPATIBILITY AND SECURITY
AGREEMENT) TERHADAP STABILITAS KEAMANAN
KAWASAN ASIA SELATAN

NAMA : HARUN ALRASYID AR

NIM E061171322

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 14 Agustus 2024

Mengetahui

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D
197312051998021001

Muh.
NIP.


Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIP. 198909132024061001

Plt. Ketua Hubungan Internasional,
Mengesahkan
Departemen


Prof. Dr. Phil. Sukri,
NIP. 1975081820080

S.IP, M.Si.
11008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLEMENTASI KERJASAMA US-INDIA COMCASA
(COMMUNICATION COMPATIBILITY AND SECURITY
AGREEMENT) TERHADAP STABILITAS KEAMANAN
KAWASAN ASIA SELATAN

NAMA : HARUN ALRASYID AR

NIM : E061171322

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 9 Agustus 2024.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, M.P.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harun Alrasyid AR
NIM : E061171322
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Kerjasama US-India COMCASA (*Communication Compatibility and Security Agreement*) terhadap Stabilitas Keamanan Kawasan Asia Selatan”** adalah hasil karya asli saya. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang saya lakukan secara mandiri dengan bimbingan dari dosen pembimbing.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiasi atau pelanggaran akademik lainnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Hasanuddin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 17 Agustus 2024


Alrasyid AR

KATA PENGANTAR

Bisillahirrahmanirrahim. Bismillah pappijappu malannying ri kalompoangna. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Implementasi Kerjasama US-India COMCASA (Communication Compatibility and Security Agreement) terhadap Stabilitas Keamanan Kawasan Asia Selatan” merupakan hasil dari upaya dan dedikasi yang panjang dalam proses penelitian dan penulisan. Penulis sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk mengeksplorasi dan menganalisis topik yang kompleks ini dalam konteks hubungan internasional dan keamanan regional.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa yang Sentiasa memerikan Hidayah, Petunjuk cinta Kasih kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi serta Skripsi ini.
2. Kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah menjadi inspirasi hidup penulis dalam segala hal.
3. Kedua Orangtua penulis, This is a love letter to you guys. For my mother’s Unconditional Love and my dad’s endless support, you guys are amazing. Skripsi ini berdiri di atas cinta kasih dan sokongan serta doa kedua orangtu penulis Hidrah Sultan

dan Arifin Ibrahim, S.Sos. pribadi penulis juga ingin meminta maaf atas segala salah, khilaf serta luput dari penulis. Semoga selalu dalam lindungan Kasih Allah SWT.

4. Saudara-saudara kandung penulis, Bi'a, Enal, dan Agung yang telah menjadi bagian besar serta berwarna dalam kisah hidup penulis.
5. Bapak Muh. Nasir Bad, S.Sos, M.Hum, Ph.D, selaku dosen pembimbing pertama, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga sepanjang proses penelitian ini. Dukungan Bapak dalam memberikan arahan yang jelas, serta nasihat yang konstruktif dan motivasi yang tinggi, sangat membantu penulis dalam menyusun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis menghargai setiap sesi bimbingan dan waktu yang telah Bapak luangkan untuk membantu penulis melalui berbagai tantangan yang dihadapi. Abdul Razaq Z Cangara, S.Ip, M.Si, MIR, selaku dosen pembimbing kedua, yang juga telah memberikan kontribusi signifikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Saran, kritik, dan wawasan yang Bapak berikan sangat membantu penulis dalam memperdalam analisis serta memperbaiki argumen dan struktur penelitian. Penulis menghargai dukungan Bapak yang telah memberikan perspektif yang berharga dan memperkaya kualitas penelitian ini.
6. Kepada sahabat-sahabat keren dari penulis Kak Cici, Tante Egi My Queen, Kiki Besar (yang tidak Besar), kak Yosz alias Leo Zulfikar Interpreter Bahasa Isyarat dari Palu, kak Alex, Mamak Mule,
7. Keluarga besar Imam Sultan tercinta, yang selalu memberikan dukungan moral dan emosional sepanjang masa studi penulis. Terima kasih atas doa, pengertian, dan dorongan yang terus-menerus diberikan. Dukungan dan kasih sayang dari keluarga

- merupakan sumber kekuatan terbesar yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan tugas ini. Tanpa mereka, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud.
8. Teman-teman sejurusan, yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa studi. Terima kasih atas semua diskusi, bantuan, dan kerjasama yang telah diberikan dalam proses penelitian dan penulisan. Keterlibatan mereka dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman sangat membantu dalam memperkaya hasil penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi dukungan moral dan semangat yang diberikan oleh teman-teman selama proses ini.
 9. Seluruh dosen dan staf di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Khususnya kak Rahmah, Kak Ridho dan kak Salni yang telah memberikan ilmu, fasilitas, dan dukungan administrasi yang diperlukan selama masa studi. Terima kasih atas semua bentuk dukungan dan bimbingan yang diberikan, yang sangat berkontribusi dalam keberhasilan penulis menyelesaikan studi ini. Penulis sangat menghargai komitmen dan dedikasi semua pihak di fakultas ini.
 10. Pihak-pihak yang telah memberikan data dan informasi, baik melalui dokumen resmi, wawancara, maupun referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Kontribusi mereka dalam menyediakan informasi yang relevan dan aktual sangat penting dalam memperkuat analisis dan temuan dalam skripsi ini. Penulis mengapresiasi setiap bentuk dukungan yang diberikan dalam proses pengumpulan data.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah memberikan dukungan moral, intelektual, dan praktis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat

diterima dengan tangan terbuka. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hubungan internasional dan keamanan regional.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang implementasi COMCASA serta dampaknya terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Selatan. Semoga temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan semua pihak yang berkepentingan dalam memahami dinamika hubungan internasional dan keamanan regional.

ABSTRAK

Harun Alrasyid AR, E061171322. “Implementasi Kerjasama US-India COMCASA (*Communication Compatibility and Security Agreement*) terhadap Stabilitas Keamanan Kawasan Asia Selatan”. Di bawah bimbingan Bapak Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D selaku dosen Pembimbing I dan Abdul Razaq Z Cangara, S.Ip, M.Si, MIR selaku dosen Pembimbing II, pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas ILMU Sosial dan Ilmu politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini membahas implementasi Kerjasama AS-India melalui perjanjian *Communication Compatibility and Security Agreement (COMCASA)* dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Selatan. COMCASA, yang ditandatangani pada tahun 2018, merupakan kesepakatan penting antara Amerika Serikat dan India untuk meningkatkan interoperabilitas dan keamanan komunikasi dalam operasi militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan COMCASA mempengaruhi dinamika keamanan regional, khususnya dalam konteks hubungan India dengan negara-negara tetangga dan pergeseran kekuatan strategis di Asia Selatan.

Metode penelitian ini meliputi analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data primer dari dokumen resmi dan wawancara dengan para ahli, serta data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi COMCASA telah memperkuat posisi India sebagai mitra strategis AS, meningkatkan kapasitas pertahanan India, dan mendorong penyesuaian kebijakan keamanan negara-negara di kawasan Asia Selatan. Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti peningkatan ketegangan dengan Pakistan dan pengaruh terhadap hubungan regional juga muncul sebagai dampak dari kesepakatan ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa COMCASA berkontribusi positif terhadap stabilitas keamanan kawasan dengan meningkatkan kerjasama militer dan intelijen, tetapi juga membawa kompleksitas baru dalam dinamika kekuatan regional. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan strategis yang hati-hati untuk mengelola hubungan internasional dan menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Selatan.

Kata Kunci: COMCASA, Kerjasama AS-India, stabilitas keamanan, Asia Selatan, interoperabilitas Militer, dinamika regional.

ABSTRACT

Harun Alrasyid AR, E061171322. *“The Implementation of the US-India COMCASA (Communication Compatibility and Security Agreement) and Its Impact on the Stability of South Asian Security”*. Under the supervision of Mr. Muh. Nasir Bad, S.Sos, M.Hum, Ph.D as the first supervisor and Abdul Razaq Z Cangara, S.Ip, M.Si, MIR as the second supervisor, in the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This thesis examines the implementation of the US-India cooperation through the Communication Compatibility and Security Agreement (COMCASA) and its impact on the stability of South Asian security. Signed in 2018, COMCASA is a significant agreement between the United States and India aimed at enhancing interoperability and security in military communications. This study aims to analyze how the implementation of COMCASA influences regional security dynamics, particularly concerning India’s relations with neighboring countries and the strategic power shifts in South Asia.

The research method involves qualitative analysis with a case study approach, using primary data from official documents and expert interviews, as well as secondary data from relevant literature. The findings indicate that the implementation of COMCASA has strengthened India's position as a strategic partner of the US, enhanced India's defense capabilities, and prompted adjustments in the security policies of South Asian countries. However, challenges such as increased tensions with Pakistan and impacts on regional relations have also emerged as consequences of this agreement.

The study concludes that COMCASA positively contributes to regional security stability by enhancing military and intelligence cooperation, yet it introduces new complexities into the regional power dynamics. The implications of these findings suggest the need for a careful strategic approach to manage international relations and maintain the balance of power in South Asia.

Keywords: *COMCASA, US-India Cooperation, Security Stability, South Asia, Military Interoperability, Regional Dynamics.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Liberal Institutionalisme	22
B. Interoperabilitas Militer	26
C. Strategic Balance	28
D. Regional Security	31
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan India	40
B. COMCASA (Communication Compatibility and Security Agreement)	56
C. Stabilitas Keamanan Asia Selatan	58

BAB IV IMPLEMENTASI COMCASA

A. India..... 65

B. Amerika Serikat 71

C. Implementasi COMCASA terhadap Stabilitas Keamanan Kawasan
Asia Selatan..... 74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN SARAN

A. Kesimpulan 81

B. Saran saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama lebih dari empat Dekade, walaupun dua negara demokrasi terbesar di dunia berbagi banyak nilai dalam politik dan dimensi sosial, perang dingin dan terbaginya kekuatan kepada dua poros telah banyak memberikan tantangan kepada hubungan antara Amerika Serikat dan India. (Burgess, 2019). pada dekade awal setelah kemerdekaan India, potensi untuk terciptanya hubungan dan kerjasama keamanan kepada orang yang lebih positif antara Washington dan New Delhi Dihalangi oleh ketidaksetujuan yang saling berhubungan yang pertama adalah Bagian yang berdampak besar yang berasal dari perang dingin. Dan gerakan India yang tidak berpihak pada satu polar namun agak mengarah pada kepentingan bersama Uni Soviet Hal tersebut dikarenakan adanya sentimen dari India yang menggunakan pola politik internasional yang berbasis pada non kolonialis. kemudian ikatan erat antara washing dan Pakistan yang merupakan Rival terbesar India di regional tersebut banyak memberikan kesan negatif dan ketidakcocokan antara washing dan New Delhi. kemudian posisi India yang absen pada perjanjian non proliferasi nuklir pada tahun 1970 dan Obsesi dalam pembangunan kapasitas senjata nuklir telah memberikan ketakutan tersendiri terhadap Amerika Serikat yang pada saat itu mengkampanyekan Gerakan Non proliferasi. Hal tersebut kemudian menjadi dasar pandangan Amerika Serikat terhadap India untuk beberapa Dekade setelahnya.

Pada akhir masa perang dingin, terpecahnya Uni Soviet dan munculnya

program liberalisasi ekonomi di India pada akhir 90-an mengarahkan era baru pada hubungan Amerika Serikat dan India yang selama ini terdapat kesan Asing. walaupun sebelumnya terdapat Interaksi yang lebih besar dalam politik ekonomi dan level militer hubungan kerjasama antara kedua negara terhalang oleh tekanan yang berhubungan pada gerakan non proliferasi. (Chatterjee, 2011)

Sejak 2006 Amerika dan India telah mengupayakan kerjasama strategis dan kerjasama bilateral dalam bidang keamanan yang diperluas meliputi perdagangan alat pertahanan serta pelatihan militer gabungan dalam kurun waktu tersebut perdagangan bilateral serta investasi secara umum juga meningkat antara kedua negara, walaupun India merupakan faktor dagang yang relatif kecil namun dari tahun ke tahun dan melalui pemindahan kekuasaan dari Presiden kepresidenan lainnya di washington DC yang Berujung pada penetapan status India sebagai pemain dan kunci utama dalam perdagangan dan kerjasama di bawah pemerintahan Donald Trump. (Congressional Research Service, 2023)

Politik luar negeri yang diberlakukan oleh India yang berdasar pada otonomi strategis mempunyai akar pada sejarah ketidak berpihakan dia pada blok manapun. Akan tetapi dalam kurun 20 tahun terakhir, India mempunyai visi untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat sebagai hasil dari berakhirnya perang dingin dan bangkitnya kekuatan Cina. hal ini kemudian membawa pada pertimbangan kedua negara terkait kerjasama strategis hal tersebut dapat dilihat dari jumlah investasi dan perdagangan bilateral meluas secara signifikan dan pada tahun 2016 Amerika Serikat memberi label pada India sebagai Mitra pertahanan besar Amerika Serikat. di beberapa tahun belakangan, Amerika Serikat dan India telah mengembangkan banyak perjanjian pertahanan dengan tujuan untuk

meningkatkan kolaborasi militer dan interoperabilitas. perjanjian-perjanjian ini termasuk logistik exchange memorandum of agreement atau LEMOA, general security of information agreement atau GEMOA serta communication compatibility and security agreement atau COMCASA. tiap-tiap perjanjian merupakan lanjutan dari perjanjian sebelumnya menciptakan rangka kerjasama pertahanan yang komprehensif.. (Mark Rosen, 2017)

Berkembangnya kerjasama pertahanan tersebut menciptakan meningkatnya pelatihan militer gabungan, transfer teknologi, dan proyek pertahanan kolaboratif antara kedua negara. kerjasama Amerika Serikat dan India dipandang sebagai Landasan dalam kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan Indo Pasifik dan merupakan elemen penting dalam menangkal ancaman regional dan meningkatkan stabilitas. Strategi keamanan nasional Amerika Serikat yang diciptakan oleh pemerintahan Donald Trump pada tahun 2017, menggunakan istilah inovasi sebagai ganti Asia Pasifik yang mana mengindikasikan bahwa adanya strategi Amerika Serikat yang memberikan label bahwa Samudra Hindia merupakan Arena kepentingannya Kemudian pada tahun 2018 pada bulan Mei pemerintahan Donald Trump memperoleh area office us Pacific command dan memasukkan area di kawasan perbatasan Barat dari negara India dan memberi nama baru sebagai Indo Pacific command Amerika. perubahan ini diatur untuk menangani bangkitnya Cina yang dipandang sebagai ancaman dan pemenuhan peran sebagai pelayan keamanan global di area benda Pasifik. (Kumar, 2009)

Bagi India kerjasama dengan Amerika Serikat bantuan untuk mencapai visinya sebagai dominasi di kawasan Asia Selatan. lebih jauh lagi investasi yang Amerika Serikat dan akses terhadap pasar India membuktikan adanya keuntungan bagi kedua

negara. dan dia tidak hanya mencapai akses terhadap sistem persenjataan Amerika Serikat yang canggih tetapi juga data intelligence yang sensitif dan Real Time dari Amerika Serikat. hal ini menambah modernisasi pada angkatan militer India dan tingkat kompetitif yang memberikan dampak kepada negara-negara di kawasan tersebut. (Khan M. A., 2023)

Terdapat di tengah-tengah dan jantung Asia, kawasan Asia Selatan secara geografis terbentang dari Hindu Kus ke semenanjung Malaya dan dari Samudra Hindia ke Pegunungan Himalaya dibatasi oleh Timur Tengah, Asia Tengah, Cina dan Asia Tenggara. hal ini berarti bahwa Asia Selatan memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah penting yang ada di dunia. hal ini berdampak pada kejadian dan aktivitas di Asia Selatan memberikan dampak langsung kepada negara-negara di sekitar kawasan tersebut dan secara tidak langsung negara lain di dunia. sebaliknya perkembangan apapun yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut dapat memberikan pengaruh ke Asia Selatan dan kepentingan negara-negara di dalam. (Khan E. M., 2013)

Wilayah ini memiliki populasi Lebih kurang 1,5 miliar jiwa, yang berarti bahwa 23% total populasi dunia berada di kawasan ini yang memiliki luas kawasan 5% dari total daratan. total pendapatan domestik bruto dari kawasan ini mencapai 3860 miliar dolar Amerika pada tahun 2009. walaupun Asia Selatan telah membuat perkembangan yang stabil di banyak indikator integrasi ekonomi regional, perkembangannya cenderung lebih lambat. walaupun tingkat pertumbuhan sangat fluktuatif sejak krisis 2008, Ekonomi Asia Selatan Bertahan di hadapan krisis global dan telah mengembangkan nilai ekspornya ke dalam banyak hal. Asia Selatan telah berkembang integrasi ekonomi internal dibandingkan dengan periode yang lalu,

namun secara subregional masih sangat jauh dari integrasi yang lebih tinggi di kawasan lain. Ini dapat dilihat dari rendahnya perdagangan yang terintegrasi dan lebih besarnya tantangan dalam liberalisasi persiapan aturan dari investasi dan Perdagangan regional. Hal ini berarti bahwa negara-negara dalam regional Asia Selatan harus mempercepat selerasi terhadap integrasi ekonomi untuk menjawab tantangan tersebut. (Bilyk, 2016)

Konflik India dan Pakistan yang terjadi sangat lama khususnya di wilayah Kashmir menjadi isu utama dalam konteks keamanan dan stabilitas di Asia Selatan. Perseteruan dan ketegangan diantara kedua negara yang dilengkapi dengan senjata nuklir yang secara periode terus terjadi memberikan tantangan terhadap stabilitas regional. India dan Pakistan merupakan Dua negara yang sangat aktif secara politik di kawasan Asia Selatan, walaupun berbeda dalam beberapa hal seperti bola politik, kebudayaan, linguistik, etnisitas, Social dan keagamaan. Kedua negara ini merupakan entitas legal yang berdaulat yang saling berkompetisi dalam rangka menjadi dominan politik di wilayah tersebut. Namun kedua negara ini memiliki perbedaan dalam potensi militer ekonomi dan teknologi. Hubungan antara India dan Pakistan sangat terancam dalam berbagai level. Masalah-masalah ini terkait dengan pembagian wilayah oleh kedua negara dan peran aktif sebagai dominator politik di kawasan Asia Selatan. (Naueje, 2015)

Kehadiran Cina di Asia Selatan yang ekspansif dan terus melebar khususnya pada kebijakannya belt and Road Initiative dan kerjasamanya dengan negara seperti Pakistan telah menambah dimensi baru dalam dinamika keamanan regional. Kebijakan China di Indo Pasifik yang tegas dan kemampuan militer yang terus meningkat berkontribusi terhadap lingkungan keamanan regional yang lebih

kompleks. Cina relatif merupakan pemain baru dalam region Asia Selatan dan memiliki pemahaman terhadap kebudayaan institusi dan organisasi di negara-negara yang ada di Asia Selatan sangat baik. Sebaliknya, negara-negara yang menjadi partner kerjasamanya di Asia Selatan juga berpikir bagaimana pola pemikiran yang dimiliki oleh Cina. perbedaan ini Memberikan sumbangsih terhadap disonansi serta kesalahan baru diplomasi. tetapi kedua belah pihak Menyadari kepentingan masing-masing negara dan bagaimana pentingnya untuk melakukan kerjasama dan hubungan yang baik hal ini berdampak pada meluasnya hubungan kerjasama antar negara.. Berkaitan dengan Amerika Serikat dan mitranya masih menjadi keinginan utama dari negara-negara Asia Selatan. ekspektasi ini dan juga tantangan dari bangkitnya kekuatan Cina bertemu dengan adanya kebijakan untuk regional jangka panjang yang konsisten. (Pal, 2021)

Kondisi geografis yang merupakan Tetangga dari 8 negara di Asia Selatan, Cina selalu menjadi tantangannya besar bagi regional tersebut. dalam garis sejarah keterlibatannya di Asia Selatan dapat dilihat dari koneksi kerjasama dengan Pakistan dan konflik perbatasan dengan India. dengan adanya belt and road inisiatif, Cina memiliki tujuan untuk memperluas hubungannya dengan negara-negara di kawasan tersebut dengan cara menawarkan proyek infrastruktur dan mitra pembangunan utamanya dengan negara-negara tetangga India. Dan juga India telah menjadi objek dari diplomasi ekonomi Cina sebagaimana dituangkan dalam Wuhan Summit tahun 2018. Namun peristiwa yang terjadi di ladakh telah banyak merusak persepsi yang baik tentang Cina dari sudut pandang India. Koridor ekonomi China Pakistan yang merupakan bagian dari inisiasi BRI dengan penanaman pasti tetap dilanjutkan sebagaimana halnya dengan proyek lainnya yang mengasingkan India.

(USIP Senior Study Group, 2022)

Ancaman yang dihasilkan oleh terorisme khususnya dari kelompok operasi yang berbasis di Pakistan dan Afganistan terus memberikan pengaruh terhadap keamanan regional. kedua negara Pakistan dan India telah menjadi target dari serangan teroris, dan terorisme antar negara tetap menjadi tantangan tersendiri bagi keamanan kawasan. pada baterai ini banyak kelompok bersenjata yang bangkit dan menggunakan teror sebagai bagian dari strategi untuk mencapai kepentingan. kemenangan Taliban di Afghanistan pada tahun 1996 yang terjadi setelah penarikan pasukan Uni Soviet dari Afganistan pada tahun 1989 telah memicu dibentuknya grup militan yang mengambil basis di daerah gas merk yang dikuasai oleh Pakistan. beberapa contoh kelompok penelitian yang banyak melakukan perilaku terorisme adalah Laskar thayyibah, dan jaiz Muhammad, yang banyak diisi oleh markir-materi yang sebelumnya menjadi bagian dari perang di Afganistan yang mempunyai tujuan untuk menguasai klasemen. Kebijakan India terhadap Kashmir setelah 7 dekade dalam konflik telah memberikan dinamika tersendiri di wilayah tersebut. hal ini memicu terjadinya serangkaian penyerangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemilikan tersebut. (Anwar A. , 2020)

COMCASA Memiliki tujuan untuk meningkatkan Keamanan dan kompatibilitas dari sistem komunikasi militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan India titik dengan menyediakan akses terhadap teknologi komunikasi yang maju dan sistem yang terenkripsi secara aman, perjanjian ini meningkatkan efektivitas operasional dalam operasi militer gabungan. Dengan kesepakatan COMCASA Ini mengilustrasikan cara Amerika Serikat untuk mendapat hubungan dengan pemerintahan India melalui pengintegrasian beberapa sistem komunikasi antara

Pentagon dan militer India. peralatan komunikasi yang disediakan oleh India yang ditempatkan dalam sistem pertahanan diharuskan berasal dari Amerika Serikat untuk mendapatkan teknologi yang lebih maju. walaupun banyak pihak politik yang memberikan kritik terhadap Modi karena perjanjian tersebut dalam dunia militer dapat membahayakan kedaulatan India. dalam militer India juga memberikan tanggapan bahwa keterbukaan sistem informasi yang dimiliki oleh sistem keamanan India akan membahayakan kepentingan nasional (Ali, 2020) Perjanjian ini memfasilitasi interoperabilitas yang lebih baik antara angkatan bersenjata AS dan India, memungkinkan mereka untuk melaksanakan operasi bersama dengan lebih efektif. Ini termasuk koordinasi yang ditingkatkan selama latihan dan misi nyata, yang mengarah pada hasil strategis yang lebih baik.

Penandatanganan “Communications Compatibility and Security Agreement” (COMCASA)—yang sekali lagi merupakan versi yang disesuaikan untuk India dari “Communication Interoperability and Security Memorandum of Agreement” (CISMOA)—telah memungkinkan pemasangan Sistem Informasi Regional Perusahaan Terpadu AS (CENTRIX), yang memungkinkan pertukaran informasi yang aman antara kedua mitra dalam format teks dan berbasis web. Selain itu, perjanjian ini memungkinkan India mengakses peralatan yang dilindungi COMCASA seperti sistem “Global Positioning System” (GPS) dan “Identification Friend or Foe” (IFF) yang canggih, di mana kata sifat “canggih” menunjukkan fitur tambahan untuk melindungi dari gangguan dan penyelewengan. (Baig, 2022)

Dengan meningkatkan komunikasi dan sinergi operasional, COMCASA memperkuat kemampuan pertahanan India dan berkontribusi pada sikap strategisnya di kawasan. Ini berdampak pada kemampuan India untuk merespons ancaman

keamanan dan terlibat dalam upaya pertahanan kolaboratif. Perjanjian ini diharapkan memainkan peran dalam menjaga stabilitas regional dengan berkontribusi pada dinamika kekuatan yang seimbang di Asia Selatan. Kerja sama militer yang ditingkatkan antara AS dan India dapat bertindak sebagai penyeimbang terhadap lawan-lawan regional dan mendukung lingkungan keamanan yang stabil. COMCASA juga memiliki implikasi untuk hubungan diplomatik dan strategis AS-India. Perjanjian ini mencerminkan pendalaman kemitraan strategis mereka dan menekankan kepentingan dan komitmen bersama dalam mengatasi tantangan keamanan regional.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana kerjasama bilateral US dan INDIA dalam bidang keamanan yaitu COMCASA (*Communication Compatibility and Security Agreement*) dan implementasinya terhadap stabilitas keamanan kawasan asia selatan. Dengan batasan penelitian tersebut, untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penuliskan merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Kerjasama US-India COMCASA (*Communication Compatibility and Security Agreement*) dapat meningkatkan Military Interoperability?
2. Bagaimana implementasi dari Kerjasama US-India COMCASA (*Communication Compatibility and Security Agreement*) terhadap stabilitas keamanan kawasan asia selatan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Kerjasama US-India COMCASA (*Communication Compatibility and Security Agreement*) berpengaruh terhadap Military Interoperability kedua negara.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi Kerjasama US-India COMCASA (*Communication Compatibility and Security Agreement*) dan pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan Kawasan Asia Selatan.

2. Manfaat Penelitian

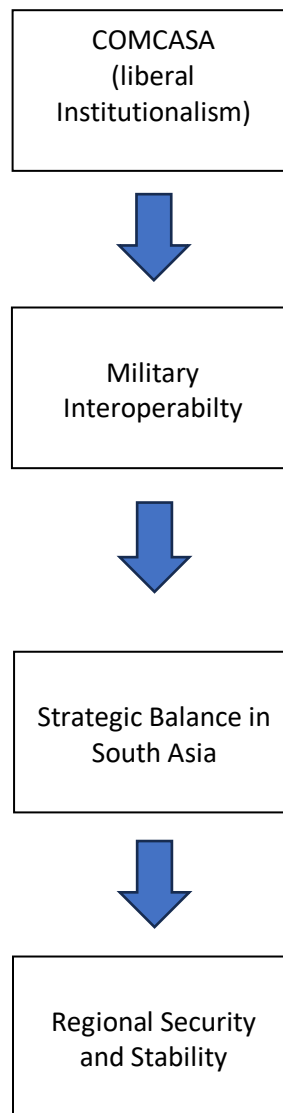
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan referensi Kerjasama US-India COMCASA (*Communication Compatibility and Security Agreement*) dan kaitannya dengan peningkatan Military Interoperability.
- b. Penelitian ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pengambil kebijakan, khususnya Kerjasama bilateral bidang militer dan keamanan militer dalam lingkup kawasan regional.
- c. Serta berkontribusi terhadap literatur akademik.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini penulis akan menggunakan dua konsep besar yaitu liberal institusionalisme yang menggambarkan bagaimana kerjasama Amerika Serikat dan India dalam bidang pertahanan dan keamanan kawasan atau regional security. 2 konsep dasar ini akan diikuti dengan konsep yang berada diantaranya yang saling mempengaruhi. liberal institusionalisme akan menjelaskan Bagaimana Amerika dan India memberikan dampak terhadap keamanan kawasan dan stabilitas di Asia Selatan. meningkatnya integralitas berdampak pada Bagaimana aktor regional melihat dan menyesuaikan diri terhadap balance of power. perubahan ini dapat berdampak pada kebijakan dan respon strategis setiap negara. dan pada akhirnya akan berdampak pada keamanan kawasan Asia Selatan. kerjasama yang meningkat dapat berakhir pada stabilitas yang lebih besar jika hal tersebut mampu mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama atau akan mengarah pada ketegangan yang terus-menerus meningkat jika aktor regional melihat hal tersebut sebagai potensi ancaman.

Research conceptual framework



Sumber: Analisa penulis

1. Liberal institutionalisme

Liberal institutionalisme dibangun dari tradisi liberal dalam hubungan internasional, yang menekankan bahwa kerjasama internasional itu memungkinkan dan menguntungkan. Teori ini berpendapat bahwa institusi internasional—seperti perjanjian, aliansi, dan organisasi—berfungsi sebagai platform bagi negara-negara untuk berkolaborasi, mengelola konflik, dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip utama termasuk pentingnya norma-norma internasional, aturan, dan organisasi dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas. (DEVITT, 2011)

Dalam konteks hubungan bilateral, institutionalisme liberal mengemukakan bahwa perjanjian formal seperti COMCASA sangat penting untuk mendorong kerjasama. Perjanjian semacam ini menetapkan aturan dan prosedur yang jelas, mengurangi kesalahpahaman, dan menciptakan lingkungan yang terstruktur untuk kolaboratif. Hal tersebut juga menyediakan mekanisme untuk penyelesaian konflik guna meningkatkan kepercayaan antara negara. COMCASA ditandatangani pada tahun 2018 di dalam agenda Dialog Keamanan AS-India 2+2 yang pertama. Sejak saat itu, perjanjian ini telah memberikan India berbagai peluang strategis. Secara teknologi, saluran data Amerika Serikat merupakan platform komunikasi data yang paling aman di dunia saat ini, dan akan memberikan India akses ke database intelijen AS. Berdasarkan perjanjian ini, Washington akan menyediakan peralatan komunikasi sensitif dan kode kepada India yang akan memberikan akses ke informasi operasional waktu nyata (Ali, 2020)

Perjanjian ini semakin memperkuat integrasi berbagai platform militer India dan dengan demikian meningkatkan kemampuan komunikasi taktis mereka. (Samran

Ali) Perjanjian ini juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi hubungan AS-India. Hal ini mencerminkan komitmen yang lebih mendalam terhadap kolaborasi strategis dan menjadi dasar bagi perjanjian pertahanan lebih lanjut. Dengan menunjukkan manfaat dari peningkatan kerjasama, COMCASA berkontribusi pada hubungan bilateral yang lebih kuat dan stabil.

2. Military Interoperability

Interoperabilitas tampaknya merupakan konsep yang tidak rumit. Secara sederhana, ini adalah ukuran sejauh mana berbagai organisasi atau individu dapat beroperasi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dari perspektif ini, interoperabilitas merupakan hal yang positif, dengan penambahan pada standarisasi, integrasi, kerjasama, dan bahkan sinergi. Interoperabilitas adalah elemen kunci dalam koalisi dan kerjasama karena memungkinkan dukungan sekutu untuk operasi gabungan dan menawarkan peningkatan efektivitas dan efisiensi angkatan bersenjata AS dan sekutunya dalam kegiatan militer yang dilakukan. Kemampuan sistem, unit, atau kekuatan untuk menyediakan layanan memberikan dan menerima layanan dari sistem, unit, atau kekuatan lain, serta menggunakan layanan yang dipertukarkan tersebut untuk memungkinkan mereka beroperasi secara efektif bersama-sama. (RAND project, 2000). Interoperabilitas memerlukan negara negara sekutu dalam ikatan perjanjian untuk berbagi doktrin dan prosedur yang sama, infrastruktur dan pangkalan militer, serta kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain. Interoperabilitas tidak selalu memerlukan peralatan militer yang sama. Yang penting adalah bahwa peralatan tersebut dapat berbagi fasilitas dan mampu berkomunikasi dengan peralatan lainnya. (NATO, 2006)

3. Strategic Balance

Ada beberapa poin yang membentuk konsep keseimbangan strategis, terutama ketika menyangkut area regional tertentu. Untuk memahami konsep besar ini, penting untuk memperhatikan konsep utama lainnya

a. Balance of Power

Konsep ini adalah salah satu dari banyak konsep yang mendefinisikan bagaimana kerangka kerja realisme berfungsi. Suatu keadaan dikatakan stabil apabila di antara dua atau lebih kekuatan yang bersaing terdapat keseimbangan kekuatan (balance of power). Dalam hubungan internasional, pemeliharaan keseimbangan di antara negara-negara untuk mencegah atau mengawasi pertumbuhan kekuatan absolut negara lain atau sekelompok negara disebut sebagai keseimbangan kekuatan. Tujuan utama dari keseimbangan kekuatan adalah membatasi sebuah negara atau sekelompok negara dari menerapkan kehendak mereka yang sah atau tidak sah terhadap negara lain di kawasan maupun sistem negara global. Dengan cara ini, tatanan internasional atau regional dipertahankan di mana berbagai langkah geostrategis dari negara mana pun secara signifikan diawasi dan diseimbangkan oleh negara-negara lain. Pada dasarnya, realis dan neo-realis menggunakan konsep BOP dalam hubungan internasional. Namun, sejarahnya sudah ada sejak peradaban manusia. Karena ideologi realisme dan neo-realisme utamanya dibangun atas dasar prinsip mempertahankan diri, maka BOP menyediakan lingkungan untuk kelangsungan hidup negara-negara yang lebih lemah dalam sistem. (BRIAN HEALY, 1973)

b. Strategic stability

Pada tahun 1990, Amerika Serikat dan Uni Soviet mendefinisikan stabilitas strategis sebagai ketiadaan insentif bagi negara mana pun untuk melancarkan serangan nuklir pertama. Sejak saat itu, lanskap geopolitik, teknologi, dan psikologis yang membantu mencegah perang antara kekuatan nuklir dunia telah berubah secara signifikan. Konsep dan kondisi untuk stabilitas strategis juga telah berubah secara mendasar, termasuk instrumen untuk mencegah konflik nuklir. (TRENIN, 2019)

Dokumen resmi AS secara teratur merujuk pada stabilitas strategis dalam arti yang lebih sempit, yaitu stabilitas dalam krisis nuklir dan perlombaan senjata. Secara khusus, pejabat Rusia telah menggunakan istilah ini untuk menggambarkan hubungan politik-militer dengan Amerika Serikat dan NATO, serta dalam konteks senjata dan perilaku terkait nuklir, konvensional, siber, dan ruang angkasa (Arbatov et al. 2010). Sementara itu, perspektif China menekankan "konsep tradisional stabilitas strategis yang didasarkan pada hubungan kerentanan nuklir timbal balik." (Kühn, 2023)

4. Keamanan dan Stabilitas Kawasan

Logika utama dari teori ini berdasarkan pada fakta bahwa semua negara di dalam tatanan internasional berkaitan di dalam konteks interdependensi dan keamanan. tetapi karena ancaman militer dan politik dapat bergerak lebih cepat dalam kondisi geologis yang sempit, insekuritas Selalu diasosiasikan dengan kondisi geografi negara-negara yang berdekatan. banyak negara yang memiliki ketakutan Dan menganggap potensi ancaman datang dari negara-negara di sekitarnya dibandingkan dari negara yang memiliki kekuatan besar dengan jarak yang jauh. Pola interdependensi dalam keamanan yang diukur dari kondisi geografis berbeda dalam sistem internasional sesuai dengan kompleksitas keamanan regionalnya. (Buzan, 2003)

Dalam keamanan kawasan regional, salah satu aspek yang menjadi ukuran bagaimana keamanan kawasan dapat dilihat adalah bagaimana stabilitas politik di dalam wilayah tersebut terjaga. Hal tersebut merujuk pada konsistensi serta lingkungan politik sebuah negara yang dapat diprediksi, yang kemudian berdampak pada keberlangsungan ketertiban, mendukung perkembangan ekonomi serta kehidupan sosial yang terpadu. Stabilitas politik juga diartikan sebagai adanya kemampuan pemerintahan suatu negara untuk berfungsi dengan efektif untuk menjaga keteraturan dalam proses politik. Hal tersebut melibatkan penyelenggaraan pemerintahan yang regular dan transparan dalam perangkat hukum yang jelas. (Chido, 2013)

Komponen yang menjadi penyangga utama dalam stabilitas politik mencakup beberapa hal seperti pemerintahan yang efektif, institusi politik, bantuan masyarakat dan legitimasi, kehidupan sosial yang terpadu. Efektivitas penyelenggara

pemerintah dapat diciptakan dari adanya perangkat hukum yang jelas. Pemerintah akan dikatakan sangat efektif apabila mempunyai kekuatan perangkat hukum yang kuat. Dampaknya adalah permasalahan individual serta organisasional dapat diselesaikan dengan jalan damai dan minim konflik. Dalam komponen lain, efektivitas pemerintahan juga dapat diukur dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Segala hal yang mengganggu prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan seperti korupsi dapat menurunkan stabilitas politik suatu negara. **(Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008)**

Institusi politik dalam suatu negara menjadi aspek utama dalam menjamin adanya stabilitas politik dari suatu negara. Institusi yang stabil dan efektif dalam klasifikasi kekuasaan dalam pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bersifat sangat esensial dalam menjaga stabilitas politik. Masing masing institusi harus bekerja dengan independen tanpa adanya kekuasaan yang mendominasi kekuasaan yang lain. Proses demokrasi juga menjadi bagian yang melekat dari aspek ini. Proses demokrasi yang dijalankan dengan konsep umum, bebas dan adil pada tahap rekrutmen jabatan politik terkait. Mekanisme demokrasi yang matang akan menyediakan mekanisme dalam transisi kekuasaan yang damai dan mencerminkan kehendak dari masyarakat.

Stabilitas politik seringkali bergantung pada legitimasi yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat. Sebuah pemerintahan yang mendapatkan tingkat legitimasi yang tinggi serta tingkat representasi yang tinggi dari masyarakat akan lebih dapat menjaga stabilitas dibanding dengan pemerintahan yang tidak mendapatkan hal yang serupa. Selain itu, stabilitas yang terjaga juga dapat dilihat dari bagaimana

pemerintah dan segala kebijakannya didukung oleh lingkup masyarakat yang lebih luas. Lebih lanjut, pemerintahan yang menyediakan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat akan mendapatkan dukungan publik yang memadai. (**The European Parliament,, 2022**)

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode deskriptif analitik analisis deskriptif digunakan oleh penulis untuk menggambarkan atau mendeskripsikan Bagaimana Dalam kerjasama Amerika dan India dalam bidang pertahanan. selanjutnya penulis akan menggunakan metode analitik untuk menjelaskan bagaimana implementasi hubungan kerjasama tersebut bagi stabilitas keamanan kawasan Asia Selatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa telaah pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, seperti literatur dalam bentuk buku, jurnal, dokumen, artikel, serta dari berbagai media lainnya seperti internet, majalah ataupun surat kabar.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan yakni analisis data kualitatif. Penulis akan melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang ditemukan mengenai kerjasama

amerika serikat dan india dalam bidang keamanan dan pertahanan yaitu COMCASA Communication Compatibility and Security Agreement. Fakta yang ada kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat, sedangkan data kuantitatif berfungsi sebagai pendukung dalam penguatan analisis kualitatif.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Data-data yang diperoleh akan digunakan untuk menggambarkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang meringkas masalah-masalah dalam rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Institusionalisme Liberal

Jaminan terhadap kebebasan individu menjadi salah satu titik perkembangan hadirnya liberalisme dalam hubungan internasional. John Locke memandang bahwa perkembangan dan kemajuan manusia dalam *Civil Society* serta konsep kapitalis modern di dalam negara-negara yang mendukung dan menjamin kebebasan individu. Pasca Perang Dunia Kedua, liberalisme terpecah menjadi empat aliran utama di antaranya yang paling populer adalah liberalisme institusional. Dasar pemikiran liberalisme institusional ini adalah fungsi institusi liberal yang lahir dari pemikiran Woodrow Wilson (mantan Presiden Amerika Serikat). Visi utama Woodrow Wilson adalah keamanan dunia di atas konsep demokrasi dan mempercayai bahwa dengan konsep tersebut akan membawa kesan buruk persaingan kekuasaan dalam hubungan internasional menjadi kebun binatang yang teratur.

Pencetus teori liberalisme institusional adalah Robert Keohane dan Joseph Nye. Nilai yang ingin dibangun adalah kerjasama antar negara sebesar besarnya untuk peningkatan stabilitas keamanan untuk perdamaian dunia. Perdebatan mengenai apakah liberalisme merupakan alternatif untuk realisme tentang validitasnya dalam teori hubungan internasional. Pandangan utama liberalisme institusional adalah gagasan mengenai saling ketergantungan dalam komitmen dan rasa saling percaya antar negara diperlukan dalam mencapai tujuan yang sama yaitu perdamaian. Pandangan mengenai peran otonom institusi internasional bagi kaum liberal institusionalis ini merupakan hal sentral dalam menekan kekacauan anarki internasional akibat dari penggunaan dan

kepemilikan senjata nuklir dalam perlombaan militer.

Liberal institusionalis berpendapat bahwa aktor intitusi internasional memilikiperan uama dalam mempromosikan perdamaian antar negara. Kemudian daripada itu, di kalangan pemikir liberal institusionalis umumnya memiliki pandangan bahwa negara dapat mencapai tujuan maksimal dari kepentingan nasionalnya melalui kerjasama. Institusi dan hasil kerjasama internasional ditekankan pada konsep multilateralisme dan kerjasamasebagai bentuk upaya dalam membangun usaha pencapaian tujuan kepentingan sebuah negara. Institusi dan kerjasama internasional yang memiliki aturan, norma, prinsip serta prsedur sebagai bentuk perintah yang harus diikuti walaupun dalam konsep hierarki kedaulatan negara, tidak ada kekuasaan yang dapat memaksakan seperangkat aturan kedalam suatu negara.

Untuk memahami bagaimana konsep liberal institusional berjalan, poin penting yang harus diketahui adalah kemunculan konsep dan pemikiran tersebut beriringan dengan peristiwa sejarah yang terjadi yang mmelatarbelakangi pemikiran tersebut muncul. Pada dasarnya pemikiran liberalisme institusional merupakan reaksi dari kondisi keamanan dan hubungan antar negara pasca perang dunia kedua. Ini menjadikan pemikir liberal institusional menjadikan perdamaian sebagai tujuan semua negar hanya bisa tercapai jika adanya kerjasama yang saling menjaga kepentingan nasional tanpa melibatkan adanya perlombaan militer yang berdampak buruk pada hubungan kerjasama.

Dalam perjalanan sejarahnya, pemikiran mengenai pentingnya kerjasama antar negara dalam mencapai tujuan perdamaian serta mencapai kepentingan nasional negara dapat tercapai membawa kedalam beberapa peristiwa terbentuknya badan badan kerjasama antar negara baik itu institusi, badan internasional, kerjasama multilateral

maupun bilateral. Berikut merupakan contoh-contoh hasil kerjasama antarnegara dalam lingkup internasional:

1. Perserikatan Bangsa Bangsa

Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB terbentuk sebagai dampak berakhirnya perang dunia kedua. Misi utama dari PBB adalah membangun kepercayaan antar negara dalam tujuan bersama untuk menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional. Tujuan utama dari misi tersebut adalah mencegah terjadinya konflik, membantu penyelesaian pihak-pihak yang sedang berkonflik, dan membantu mewujudkan perdamaian. Di dalam struktur hierarki PBB, badan yang memiliki peran untuk menjaga perdamaian antar negara anggota adalah Dewan Keamanan. Fungsi utama Dewan Keamanan adalah membantu memberikan arahan kepada pihak-pihak yang memiliki konflik untuk melakukan penyelesaian dengan cara yang lebih damai dengan metode yang akan menjauhkan dari konflik yang lebih besar atau berkepanjangan. **(Rizki Fadillah, 2018)**

2. SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)

SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) atau Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan merupakan suatu bentuk kerjasama berbasis regional yang mencakup 8 negara di wilayah Selatan Asia. Bentuk Kerjasama regional ini awalnya -diinisiasi oleh presiden Bangladesh Ziaur Rahman pada Mei 1980. Walaupun sebelumnya banyak konferensi multinasional dengan membawakan konsep Kerjasama regional banyak dilakukan, Ziaur Rahman mengambil ide ASEAN sebagai acuan

dalam membuat adanya Kerjasama serupa dan mempromosikan hal tersebut pertama kali pada saat melakukan kunjungan ke india. Latar belakang mengenai proposal presiden Rahman pada saat itu adalah sebagai berikut **(Wagner, 2021)**

- a. Perubahan kepemimpinan politic di beberapa negara asia selatan
 - b. Motif personal presiden Rahman dalam meredam isu kudeta di negaranya dan membutuhkan dukungan politik dari negara besar di regional seperti india dan pakistan.
 - c. Krisis keuangan yang melanda banyak negara asia selatan yang terjadi akibat adanya krisis minyak di tahun 1979
 - d. Kegagalan dialog antar regional Utara-Selatan dan membangun proteksionisme antar aktor regional.
3. Quadrilateral Security Dialogue Amerika Serikat, Jepang, Australia, India
- Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India berbagi nilai fundamental dalam politik dan hubungan internasional serta visi dalam mencapai perdamaian. Sebagai tindak lanjut, keempat negara tersebut mempromosikan kerjasama quadrilateral praktis dalam berbagai bidang seperti infrastruktur, perubahan iklim, serta perkembangan militer. Kerjasama komunikasi ini dibangun atas dasar prinsip Indo Pasifik yang bebas dan terbuka. Dalam komunikasi dan kerjasama ini juga mengkampanyekan bagaimana berperan aktif dan positif dalam kontribusi di regional masing-masing. Jika ditarik garis sejarahnya, pertemuan ini pertamakali dihembuskan sebagai bagian dari respon negara-negara tersebut

terhadap bencana alam tsunami yang kemudian berdampak besar di banyak negara dan memerlukan perhatian besar dari berbagai negara yang terjadi pada tahun 2004.

4. COMCASA (*Communication Compatibility and Security Agreement*)

Pada bulan September 2018, Kementerian pertahanan India dan Amerika Serikat melakukan pertemuan bilateral 2+2 yang kemudian memunculkan kerjasama non institusi dalam bidang pertahanan dan militer. Kerjasama ini kemudian menjadi penanda bagaimana kerjasama antar kedua negara kedepannya. Kerjasama ini mempengaruhi Status quo serta keberlanjutan hubungan kerjasama India dan Amerika di masa mendatang dan efeknya terhadap tradisi India dalam strategi yang bersifat otonom yang kemudian berdampak pada berubahnya kondisi geopolitik dan peta kekuatan dunia. Kerjasama ini menuai banyak respon di kalangan masyarakat India, dimana banyak yang berpendapat bahwa kerjasama tersebut akan membawa hal positif bagi India dalam perannya sebagai aktor utama hubungan internasional di wilayah Asia Selatan. Walaupun demikian, perdebatan mengenai apakah kerjasama demikian akan berdampak baik untuk India atau tidak banyak terjadi. Di dalam kerjasama tersebut, kedua negara bebas untuk bertukar informasi intelijen serta penggunaan aset militer dalam hal teknologi dengan bebas serta adanya jaminan bahwa informasi geografis masing-masing akan aman tanpa adanya pihak atau negara lain yang dapat mengetahuinya.

Liberal institusionalisme adalah teori dalam studi hubungan internasional yang menekankan pentingnya institusi internasional dalam memfasilitasi kerjasama antar negara dan mengelola konflik. Teori ini muncul sebagai respons terhadap pendekatan realis, yang berfokus pada kekuatan dan anarki internasional. Institusi internasional menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku negara, menciptakan struktur yang memfasilitasi interaksi yang lebih prediktif dan teratur. Institusi membantu negara-negara untuk menemukan kepentingan bersama dan bekerja sama dalam mencapai hasil yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menyediakan transparansi dan mekanisme verifikasi, institusi internasional mengurangi ketidakpastian dan risiko konflik. Dalam konteks keamanan, institusi dapat meningkatkan interoperabilitas antara negara-negara dan memfasilitasi koordinasi dalam situasi krisis.

COMCASA (Communications Compatibility and Security Agreement) adalah perjanjian bilateral yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan India pada tahun 2018. Perjanjian ini dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas sistem komunikasi militer dan memastikan keamanan komunikasi antara angkatan bersenjata kedua negara. Untuk memahami bagaimana COMCASA mencerminkan prinsip-prinsip liberal institusionalisme.

Liberal institusionalisme menekankan bahwa institusi, baik formal maupun informal, memfasilitasi kerjasama antar negara dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk interaksi. COMCASA adalah

contoh dari jenis institusi bilateral yang dirancang untuk meningkatkan hubungan strategis antara Amerika Serikat dan India. Perjanjian ini memungkinkan kedua negara untuk melakukan operasi militer bersama dengan lebih efektif. Dengan menyediakan sistem komunikasi yang kompatibel, COMCASA membantu memastikan bahwa kedua angkatan bersenjata dapat berkoordinasi dalam situasi krisis atau konflik. Ini adalah bentuk kerjasama yang ditingkatkan melalui institusi internasional. Selain operasi militer, COMCASA juga mendukung latihan militer bersama yang lebih efektif, mengurangi hambatan teknis dan memastikan bahwa kedua negara dapat bekerja sama dengan lebih lancar.

Salah satu prinsip kunci liberal institusionalisme adalah pengurangan ketidakpastian dalam hubungan internasional. COMCASA berperan dalam mengurangi ketidakpastian terkait interoperabilitas dan keamanan komunikasi. Dengan mengatur sistem komunikasi yang digunakan oleh kedua negara, COMCASA menciptakan kejelasan mengenai bagaimana informasi akan ditransmisikan dan dilindungi. Ini mengurangi risiko kesalahpahaman atau konflik yang dapat timbul dari komunikasi yang tidak efektif. Perjanjian ini juga berfungsi untuk membangun kepercayaan antara Amerika Serikat dan India. Kepercayaan ini penting dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks militer di mana ketidakpastian dapat memiliki konsekuensi serius.

Liberal institusionalisme menekankan pentingnya norma dan standar internasional dalam membentuk perilaku negara. COMCASA beroperasi

sesuai dengan norma dan standar global terkait keamanan komunikasi dan interoperabilitas. Perjanjian ini menyelaraskan sistem komunikasi militer Amerika Serikat dan India dengan standar internasional, memastikan bahwa kedua negara dapat beroperasi dalam kerangka internasional yang diakui. Ini mencerminkan bagaimana institusi internasional dapat menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku negara. Dengan adanya COMCASA, kedua negara setuju untuk mematuhi standar internasional dalam hal keamanan komunikasi, yang membantu memastikan bahwa perjanjian ini efektif dan sesuai dengan praktik terbaik global.

Interoperabilitas adalah aspek penting dari kerjasama internasional, terutama dalam konteks militer. COMCASA berkontribusi langsung pada penguatan interoperabilitas antara angkatan bersenjata Amerika Serikat dan India. Dengan sistem komunikasi yang kompatibel, kedua negara dapat melakukan operasi militer bersama dengan lebih efisien. Ini penting dalam situasi krisis di mana koordinasi yang baik dapat mencegah konflik dan meningkatkan respons bersama. COMCASA juga memfasilitasi latihan militer dan simulasi yang melibatkan kedua negara, meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dalam berbagai skenario operasional.

Liberal institusionalisme tidak hanya fokus pada kerjasama bilateral tetapi juga pada kontribusi terhadap stabilitas regional dan global. COMCASA berperan dalam menciptakan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dengan memperkuat hubungan strategis antara dua kekuatan besar. Dengan memperkuat kerjasama militer antara Amerika Serikat dan India,

COMCASA membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil di kawasan Indo-Pasifik, yang penting untuk keamanan dan stabilitas regional. Perjanjian ini juga berkontribusi pada keamanan global dengan meningkatkan kemampuan kedua negara untuk bekerja sama dalam menghadapi ancaman bersama, seperti terorisme dan agresi regional.

COMCASA merupakan contoh nyata dari bagaimana prinsip-prinsip liberal institusionalisme diterapkan dalam praktik hubungan internasional. Perjanjian ini mencerminkan bagaimana institusi internasional, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral, dapat memfasilitasi kerjasama, mengurangi ketidakpastian, membangun kepercayaan, menyelaraskan standar internasional, dan meningkatkan interoperabilitas. Dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk komunikasi yang aman dan efisien, COMCASA membantu mencapai tujuan bersama antara Amerika Serikat dan India serta berkontribusi pada stabilitas dan keamanan regional. Ini menunjukkan bagaimana liberal institusionalisme dapat menjelaskan dan mendukung upaya kerjasama internasional yang efektif.

B. Interoperabilitas Militer

Military Interoperability merupakan sebuah istilah yang menggambarkan adanya kerjasama di bidang Militer antar negara dimana sumber daya militer berupa alat serta teknologi dan informasi dapat dikendalikan oleh beberapa negara dalam mencapai tujuan bersama. Military Interoperability merupakan salah satu komponen penting dalam strategi pertahanan kontemporer, dimana negara yang

menjadi bagian kerjasama memiliki akses terhadap sumber daya teknologi dan informasi. Di era dengan dengan tantangan yang kompleks serta operasi militer multi nasional, kerjasama antar angkatan bersenjata serta sumber daya militer untuk bekerja bersama sama menjadi sangat krusial. **(RAND project, 2000)**

Pada dasarnya military interoperability mengacu pada akses terhadap sumber daya militer oleh berbagai negara memiliki tujuan yang sama, yaitu efisiensi dalam merespon adanya ancaman militer dari berbagai dimensi. Integrasi dari berbagai aspek seperti sistem komunikasi, perlengkapan persenjataan, prosedur operasional, dan koordinasi taktis. Dengan adanya aksesibilitas yang setara, negaranegara anggota akan dapat bekerja secara kohesif, informasi yang terbuka serta kemudahan dalam mencapai tujuan bersama. **(Volme, 2021)**

Di dalam dimensi kerjasama militer dan military interoperability, dapat dikategorikan kedalam beberapa level yaitu **(Codner, 1999)**

1. Technical Interoperability yaitu akses yang terbuka perangkat keras maupun lunak seperti sistem komunikasi, sistem persenjataan, serta sistem deteksi dan radar.
2. Procedural interoperability yaitu kesesuaian standar operasi prosedural dan perangkat aturan sehingga menciptakan sistem pengoperasian sumber daya yang sinkron.
3. Organizational Interoperability yaitu integrasi struktur militer dan hirarki koordinasi guna menciptakan sistem koordinasi yang baik.
4. Cultural Interoperability yang mencakup kesepahaman serta adaptasi yang baik terhadap kultur serta praktek militer antar negarayang memiliki

perbedaan.

Military interoperability meningkatkan efektivitas operasi militer Bersama dengan menjamin adanya kerja sama yang baik dan benar badan militer antar negara. Hal tersebut kemudian menjadi vital mengingat tujuan misi multinasional seperti operasi penjaga perdamaian, pengawasan humanitarian, serta kontak bersenjata antar negara di mana diperlukan koordinasi satu arah yang baik dan terarah dengan bagus. (Codner, 1999) salah satu tujuan dari Military Interoperability adalah memperkuat aliansi serta Kerjasama antar negara. Interoeranility yang efektif dengan cara membangun kepercayaan antar negara anggota. Dampaknya kemudian adalah kerjasama dalam bidang pertahanan yang lebih kokoh serta masing masing akan memiliki kontribusi terhadap kemandirian kolektif dan onjek strategiyang dapat diformulasikan bersama. (Learn, 2016) Sebagaimana ancaman terhadap keamanan yang berubah, seperti meningkatnya terorisme, serangan siber, serta konflik regional lainnya, konsep interoperability dalam bidang militer membiarkan respon yang lebih adaptif serta fleksibel. Hal tersebut dapat membuat negara anggota memiliki banyak sumber informasi sumber intelijen yang beragam serta eksekusi operasi strategis bersama yang lebih efektif.

C. Strategic Balance

Strategic Balance mengacu pada keseimbangan militer, ekonomi serta kekuatan politik antar negara dalam lingkup tertentu. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah salah satu entitas tertentu untuk mendominasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik. Konsep ini bersifat krusial dalam hubungan internasional dalam teori maupun praktek, mempengaruhi strategi diplomatik, kerjasama militer serta stabilitas politik

global. Sebagaimana dinamika kondisi global yang berubah ubah, memahami prinsip serta tantangan strategic balance bersifat krusial baik untuk pengambil kebijakan maupun para pemikir hubungan internasional. **(Khan M. A., 2023)**

Berikut merupakan beberap akonsep yang membangun bagaimana strategic balance dapat berjalan dengan baik:

1. Balance of Power Theory

Teori Balance of power merupakan konsep fundamental dalam hubungan internasional, dalam prinsipnya, keamanan nasional akan meningkatdengan adanya kecakapan militer yang terdistribusi dengan baik sehingga tidak ada negara yang akan cukup kuat untuk mendominasi negara lain. Keseimbangan ini kemudian menghasilkan stabilitas dan perdamaian karena negara saling mengimbangi ancaman yang dapat timbul. **(BRIAN HEALY, 1973)**

2. Balance of Threat Theory

Teori Balance of Threat merupakan level selanjutnya berikutnya dalam teori Balance of Power. Dikemukakan oleh Stephen Walt, teori ini memiliki konsep yang berfokus pada ancaman yang dirasakan oleh suatu negara daripadapabilitas dari negara lain. Berdasarkan teori ini, negara dapat mengimbangi ancaman atas dasar persepsi negara tersebut terhadap ancaman yang mungkin akan diberikan oleh negara lain. Dalam mempertimbangkan ancaman yang ada, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbanagn seperti kemampuan militer, intensi, serta kondisi kedekatan geografis antar negara. **(Cook, 2000)**

3. Strategic Stability

Strategic Stability atau stabilitas strategis merujuk pada kondisi dimana tidak ada negara yang memiliki dorongan untuk menginisiasi konflik dikarenakan adanya keseimbangan dalam kemampuan militer. Hal tersebut mencakup penggunaan nuklir sebagai deterrence, kekuatan konvensional, dan komunikasi strategis untuk menjaga perdamaian serta mencegah eskalasi yang mengarah pada konflik. **(Christopher S. Chivvis, 2017)**

Dalam konteks sejarah, Strategic Balance dapat diklasifikasikan kedalam beberapa penggalan sejarah yang berbeda beda. Pada masa perang dingin, Strategic Balance dapat dipahami karena adanya persaingan dua negara adikuasa dalam bidang nuklir yang kemudian berdampak pada keseimbangan kekuatan dimana keadaan ini membuat dua aktor superpower mencegah adanya konflik langsung serta membentuk pola aliansi global dan kebijakan keamanan. Kemudian dalam lingkup yang lebih kecil, eropa kemudian melakukan penggambaran ulang terhadap batas batas nasional serta menciptakan sistem aliansi yang bertujuan mencegah negara tertentu untuk mendominasi negara lainnya. Hal ini berdampak positif terhadap terjaganya perdamaian di eropa pada abad ke 19.

Di masa kontemporer, pada abad ke 21 ditandai dengan adanya aktor aktor baru yang mulai menjadi dominator dalam peta politik global. Kebangkitan cina sebagai kekuatan baru mendorong adanya perubahan dalam strategic balance secara global. Perkembangan ekonomi serta militer cina yang pesat menjadi tantangan tersendiri terhadap keseimbangan yang telah ada, serta menjadi dorongan terhadap kekuatan besar lainnya dalam mengambil bagian dari pengaruh dinamika keamanan global.

Strategic Balance yang dapat dijaga dengan baik, akan berkontribusi terhadap stabilitas global dengan cara menghalangi aksi yang agresif serta mengurangi potensi konflik yang besar. Dengan demikian hal tersebut dapat memelihara lingkungan internasional yang dapat diatasi dimana negara-negara dapat terlibat aktif dalam kerjasama dan diplomasi yang baik. Selain itu, Strategic Balance memberikan pengaruh terhadap format serta keberlangsungan aliansi. Negara-negara yang bekerjasama dengan baik untuk mengimbangi ancaman dan stabilitas serta keseimbangan dalam kekuasaan. Dengan menjaga tidak adanya kekuatan tunggal yang mendominasi yang lain, Strategic Balance memiliki peran dalam pencegahan konflik. Kemungkinan Negara-negara untuk terlibat dalam agresifitas dengan pemikiran bahwa melakukan hal demikian akan mengganggu stabilitas dan keseimbangan akan menjadi penghalang kebijakan politik internasional yang agresif. (TRENIN, 2019)

Dalam dunia modern, strategic balance memiliki beberapa tantangan yang dapat mengganggu stabilitas politik global. Pertama adanya ancaman perang asimetris dimana aktor kecil seperti negara maupun non negara menggunakan taktik yang non konvensional untuk mengimbangi musuh dengan kekuatan besar. Menantang pemikiran tradisional mengenai keseimbangan strategis. Dalam tahap akhir, hal tersebut bersifat rumit dalam pengukuran keseimbangan strategis.

D. Regional Security and Stability

Keamanan kawasan merujuk pada ukuran dan mekanisme yang terimplementasikan guna menjamin adanya perdamaian, stabilitas, dan keamanan di dalam wilayah geografis tertentu. Hal tersebut mengacu pada banyak lingkup aktivitas seperti kebijakan, aktivitas, serta rancangan strategi dengan maksud untuk mengatur urusan

keamanan di dalam suatu wilayah. Keamanan kawasan regional sangat penting dalam keberlangsungan aktivitas hubungan internasional yang sehat. Wilayah cakupan dalam konsep ini beragam, dapat berupa benua, sub-benua, atau gabungan wilayah negara-negarayang lebih kecil. Lingkungan yang ingin dibangun di antara negara-negaradi wilayah geografis tersebut mencakupkeamanan dalam konteks politik, ekonomi, militer dan kehidupan sosial. **(Kusztal, 2017)**

Dalam keamanan kawasan regional, salah satu aspek yang menjadi ukuran bagaimana keamanan kawasan dapat dilihat adalah bagaimana stabilitaspolitik di dalam wilayah tersebut terjaga. Hal tersebut merujuk pada konsistensi serta lingkungan politik sebuah negara yang dapat diprediksi, yang kemudian berdampak pada keberlangsungan ketertiban, mendukung perkembangan ekonomi serta kehidupan sosial yang terpadu. Stabilitas politik juga diartikan sebagai adanyakemampuan pemerintahan suatu negara untuk berfungsi dengan efektif untuk menjaga keteraturan dalam proses politik. Hal tersebut melibatkan penyelenggaraan pemerintahan yang regular dan transparan dalam perangkat hukum yang jelas. **(Chido, 2013)**

Komponen yang menjadi penyangga utama dalam stabilitas politik mencakup beberapa hal seperti pemerintahan yang efektif, institusi politik, bantuan masyarakat dan legitimasi, kehidupan sosial yang terpadu. Efektivitas penyelenggara pemerintahdapat diciptakan dari adanya perangkat hukum yang jelas. Pemerintah akan dikatakan sangatefektif apabila mempunyai kekuatan perangkat hukum yang kuat. Dampaknya adalah permasalahan individualserta organisasional dapat diselesaikan dengan alan damai dan minim konflik. Dalam komponen lain, efektivitas pemerintahan juga dapat diukur dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Segalahal yang

mengganggu prinsiptransparansi dan akuntabilitas pemerintahan seperti korupsi dapat menurunkan stabilitas politik suatu negara. **(Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008)**

Institusi politik dalam suatu negara menjadi aspek utama dalam menjamin adanya stabilitas politik dari suatu negara. Institusi yang stabil dan efektif dalam klasifikasi kekuasaan dalam pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bersifat sangat esensial dalam menjaga stabilitas politik. Masing masing institusi harus bekerja dengan independen tanpa adanya kekuasaan yang mnedominasi kekuasaan yang lain. Proses demokrasi juga menjadi bagian yang melekatdari aspek ini. Proses demokrasi yang dijalankan dengan konsep umum, bebas dan adil pada tahap rekrutmen jabatan politik terkait. Mekanisme demokrasi yang matang akan menyediakan mekanisme dalam transisi kekasaan yang damai dan mencerminkan kehendak dari masyarakat.

Stabilitas politik seringkali bergantung pada legitimasi yangditerima oleh pemerintah dari masyarakat. Sebuah pemerintahan yang mendapatkan tingkat legitimasi yang tinggi serta tingkatrepresentasi yang tinggi dari masyarakatakan lebih dapat menjaga stabilitas dibanding dengan pemerintahan yang tidak mendapatkan hal yangserupa. Selain itu, stabilitas yang terjaga juga dapatdilihatdari bagaimana pemerintah dan segala kebijakannya didukung oleh lingkup masyarakat yang lebih luas. Lebih lanjut, pemerintahan yang menyediakan kebutuhan hidup dasarbagi masyarakatakan mendapatkan dukungan publik yang memadai. **(The European Parliament,, 2022)**

Tatanan sosial yang stabil dan terpadu menjadi bagian penting dai aspek aspek yang menjadi bagian utama dari stabilitas politik dalam suatu negara. Stabilitas politik berjalan di atas keterpaduan serta inklusivitas sosial yang tinggi. Jaminan mengenai

adanya representasi dari setiap aspek masyarakat dengan latar belakang yang beragam dari aspek sosial, etnis dan keagamaan dalam proses politik akan sangat membantu dalam mencegah ketegangan dan pecahnya konflik. Di dalam pemerintahan yang inklusif dan dengan dibantu tatanan sosial masyarakat yang terpadu akan melahirkan mekanisme yang efektif dalam pemecahan permasalahan dalam lingkup sosial dan politik dan melahirkan stabilitas yang baik. Masyarakat dengan tatanan dan keterpaduan yang tinggi akan melahirkan budaya mediasi, negosiasi, serta dialog dalam pencegahan konflik sebelum eskalasi dan menjadi level lebih tinggi.

Perkembangan ekonomi dalam stabilitas politik juga memiliki peran krusial. Stabilitas politik yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk aktifitas ekonomi seperti investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik. Kecenderungan investor untuk melakukan investasi di negara dengan stabilitas politik sangat tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan konsistensi kebijakan dalam pemerintah di bidang ekonomi. Pemerintahan yang stabil dapat mengimplementasikan kebijakan ekonomi jangka panjang dan melakukan perubahan terhadap perubahan tersebut tanpa adanya gangguan dapat meningkatkan stabilitas dan perkembangan ekonomi. **(Veiga, 2011)**

Stabilitas ekonomi memungkinkan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar dan pokok seperti edukasi, kesehatan, dan perkembangan infrastruktur secara konsisten. Keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pokok bagi masyarakat oleh pemerintah akan melahirkan kepercayaan sosial serta tingkat kepuasan terhadap institusi pemerintah akan membangun kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Pada bagian final dari pemenuhan aspek aspek di atas akan membawa pada

bagaimana stabilitas politik suatu negara akan menurunkan kemungkinan konflik internal yang pada tahap lanjut akan terjadi *spill over* ke negara-negara di dalam wilayah regional. Untuk itu, stabilitas politik suatu negara berperan sangat penting bagi stabilitas keamanan kawasan regional. Pada dasarnya, negara-negara dengan stabilitas politik yang baik akan lebih terlibat aktif dalam kerjasama regional dan usaha integrasi kebijakan serta meningkatkan stabilitas keamanan kawasan regional. (USAID, 2023)

Stabilitas politik dapat diidentifikasi dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsep tersebut diantaranya:

1. Kualitas pemerintahan

Tingkat korupsi yang tinggi dapat menurunkan kualitas pemerintahan dan berdampak buruk bagi stabilitas politik dalam suatu negara. Hal tersebut dapat menggerus tingkat kepercayaan publik kepada institusi politik serta menyebabkan ketidakpuasan sosial yang tinggi.

Institusi yang lemah serta tidak efisien dapat berujung pada ketidakstabilan politik karena adanya kegagalan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan manajemen konflik yang tidak memadai.

2. Kondisi ekonomi

Ketimpangan ekonomi sedikit banyak juga sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik. Ketimpangan ekonomi dapat memicu kerusuhan sosial serta berdampak buruk terhadap stabilitas politik. Pada dasarnya, pemerintah yang menjaga disparitas ekonomi akan dapat menjaga stabilitas. Sebaliknya, penurunan kondisi ekonomi dan krisis akan menghilangkan stabilitas politik yang berujung pada kerusuhan politik.

3. Dinamika sosial

Klasifikasi sosial berdasarkan etnis dan agama akan sangat mengancam stabilitas politik jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Ketidakpuasan publik yang meluas terhadap kinerja, kebijakan pemerintah serta kasus korupsi yang tinggi dapat melahirkan protes serta meningkatkan ketidakstabilan politik.

4. Pengaruh eksternal

Intervensi eksternal baik dalam aspek militer, ekonomi, serta politik dapat berdampak pada kurangnya stabilitas politik negara maupun wilayah. Pengelolaan pengaruh eksternal sangat penting dalam menjaga stabilitas. Kondisi geopolitik semacam ini dapat melahirkan kompetisi yang kemudian memperlihatkan bagaimana pentingnya strategi sebuah negara dalam menjaga stabilitas politiknya. (ACAR, 2019)

Memastikan keamanan kawasan regional melibatkan lingkup mekanisme dan strategi yang luas untuk mencegah konflik, menanggulangi krisis, dan meningkatkan stabilitas di dalam lingkup geografis wilayah tertentu. Berikut merupakan beberapa mekanisme kunci dalam menjamin adanya stabilitas keamanan regional (Security issues):

1. Organisasi Regional

- a. Organisasi keamanan regional seperti NATO (North Atlantic Treaty Organization), the African Union (AU), dan the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keamanan Kawasan regional. Organisasi-organisasi ini seringkali berkoordinasi dalam pengukuran keamanan kolektif yang mencakup

misi misi penjaga perdamaian dan menjadi bagian aktif dari fasilitator mediasi dan diplomasi.

- b. Komunitas ekonomi regional seperti The European Union (EU), the Economic Community of West African States (ECOWAS), dan the Southern African Development Community (SADC) merupakan contoh bagaimana komunitas regional dalam bidang ekonomi juga mendapat peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan Kawasan. Dengan mendukung integrasi dan kerjasama ekonomi, organisasi organisasi ini membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan stabilitas dengan cara berbagi kepentingan ekonomi serta kebijakan ekonomi yang kolaboratif.

2. Aliansi dan Pakta Keamanan

- a. Perjanjian kerjasama keamanan kolektif yang mencegah adanya agresi dari luar wilayah dengan memberlakukan respon militer kolektif.
- b. Pakta bilateral dan multilateral yang menargetkan jaminan keamanan terhadap negara-negara anggota dengan cara berbagi informasi intelijen, operasi bersama serta pelatihan militer.

3. Mekanisme Diplomasi

Mekanisme diplomasi sering digarisbesarkan sebagai permainan dalam tawar-menawar dalam mewujudkan kepentingan nasional sebuah negara. Dalam era modern, diplomasi sering disejajarkan dengan upaya yang lebih kompleks dalam konteks perdamaian. Organisasi multinasional seperti PBB (perserikatan Bangsa-Bangsa) mengambil peran aktif dalam

menyebarkan penggunaan kekuatan dalam misi menjaga perdamaian dengan cara memfasilitasi mediasi perdamaian di zona konflik dan memecahkan masalah yang terjadi. Misi semacam ini memiliki fungsi untuk menstabilkan area yang terdampak konflik sementara usaha mediasi bekerja untuk negosiasi dan mencegah eskalasi konflik. (Jan Melissen). Melalui platform seperti ASEAN Regional Forum dan Helsinki Process, menyediakan platform untuk dialog antar aktor regional. Platform ini kemudian mengizinkan negara-negara untuk melakukan dialog mengenai kekhawatiran mengenai keamanan, mendiskusikan konflik potensial, serta membangun kepercayaan bersama yang terjalin dari komunikasi yang berkelanjutan.

4. Mekanisme Militer dan Pertahanan

Hal esensial dalam keamanan dan stabilitas kawasan regional adalah mekanisme militer dan pertahanan. Hal tersebut diakibatkan oleh peran mekanisme militer dan pertahanan dalam mencegah dan merespon ancaman melalui strategi operasional serta pengukuran taktis. Salah satu bentuk mekanisme dalam militer dan pertahanan adalah operasi latihan militer bersama. Latihan berbasis kolaborasi akan menumbuhkan kepercayaan dan kesepahaman mutual antar partisan yang akan berdampak baik pada penguatan keamanan kawasan regional. Latihan operasi militer semacam ini dapat meningkatkan kemampuan militer dalam pengoperasian angkatan bersenjata dengan efektif dan efisien. (Culea, 2023)

5. Mekanisme Ekonomi dan Pembangunan

Mekanisme ekonomi seperti integrasi ekonomi meningkatkan interdependensi antar negara. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap berkurangnya potensi konflik yang diakibatkan oleh kepentingan ekonomi yang timpang (Rostyslav Bilyk 2016). Di beberapa belahan dunia, kerjasama berbasis regional yang didasarkan pada kepentingan ekonomi banyak dijumpai seperti North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) yang keduanya mendukung adanya integrasi ekonomi sesama negara dalam region; masing masing yang menitikberatkan pada kerjasama ekonomi yang memadai.

6. Kerjasama Informasi Intelejen

Efektivitas kerjasama intelijen yang tinggi serta alur informasi yang masif meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dan merespon segala bentuk ancaman terhadap keamanan mencakup terorisme dan kejahatan yang terorganisir. Badan badan seperti Five Eyes alliance or the EU's Intelligence and Situation Centre (INTCEN) berperan banyak dalam peningkatan keamanan dengan cara transparansi informasi kritis sesama negara anggota **(Fachruddin Usuluddin, 2020)**

7. Humanitarian dan usaha Resolusi Konflik

Dalam penanganan konflik yang berdampak pada krisis humanitarian, organisasi humanitarian mengambil peran sebagai penyedia bantuan serta berperan aktif dalam usaha dukungan untuk wilayah pasca konflik. Bantuan humanitarian diperlukan untuk meringankan dampak konflik serta mempercepat perbaikan terhadap stabilitas wilayah pasca konflik. Program

pencegahan konflik dalam resolusi konflik memberikan program untuk pencegahan konflik seperti inisiasi rekonsiliasi terhadap komunitas serta peringatan dini terhadap potensi terjadinya eskalasi konflik dalam sebuah wilayah (Aljebori, **The Conflict and Competition among Regional Powers and its Effect on the Region's Stability, 2024**)